



BAPPEBTI

MINISTRY OF TRADE

News Title : Komisi VI Minta Pemerintah Fokus Fasilitas Pedagog Tahun Depan

Media Name : validnews.id

Journalist : Khairul Kahfi

Publish Date : 21 September 2021

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Nevi Zuraina (Anggota Komisi VI DPR RI), Nasim Khan (Anggota Komisi VI DPR RI), Muhammad Lutfi (Menteri Perdagangan)

Ads Value : 0

Section/Rubrication : -

Topic : SRG

21 September 2021 | 20:30 WIB

Komisi VI Minta Pemerintah Fokus Fasilitas Pedagog Tahun Depan

Ketidaksiptan pandemi membuat perdagangan semakin condong bergeser ke dalam ekosistem digital, pemerintah diminta membantu pedagang pasar dan UMKM

Penulis: Khairul Kahfi

Editor: Dian Nugraha



Sering pembeli menggunakan bongkar muat per kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. ANTARA/UTOM Dayu/Ridwan

JAKARTA— Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuraina mengingatkan pemerintah agar intensif mendampingi pedagang pasar pada 2022. Utamanya, dalam berkegiatan jual-beli di ekosistem daring atau online.

"Ini mesti jadi target utama Kemendag pada 2022 dalam menggunakan anggaran. Karena kemungkinan pandemi masih ada pada tahun depan dan belum selesai," terangnya dalam Raker dengan Kemendag, Jakarta, Selasa (21/9).

Melansir data Kemendag, pemerintah memprediksi nilai transaksi e-commerce Indonesia sepanjang 2021 potensial mencapai Rp254,3 triliun. Jumlah itu meningkat 33,13% tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp266,2 triliun.

Di sisi volume transaksi juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 68,34% tahun. Pada 2021, diprediksi volume transaksi mencapai 1,3 miliar transaksi atau naik sebesar 38,17% tahun, lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 925 juta transaksi.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto juga memercenai anggaran Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag. Di mana belum terdapat rincian anggaran untuk pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro-Menengah atau UMKM nasional, khususnya terkait aktivitas jual-beli di dunia digital.

Pada hal, tegasnya, fungsi itu sudah menjadi tugas Ditjen terkait sesuai UU 7/2014 tentang Perdagangan, untuk mengatur isu seputar pelatihan UMKM.

"Dari riset yang saya lihat di e-commerce, (penjual) yang berhasil itu yang menguasai teknik manajemen. Maka perlu dukungan dari Kemendag untuk mengadakan pelatihan," ungkap Darmadi.

Menurut Anggota P-PDI Perjuangan itu, UMKM yang mempunyai akses di e-commerce tidak cukup hanya dibekali kemampuan digital marketing. Lebih jauh, juga perlu pemahaman dasar soal teknik manajemen.

Selain itu, para pelaku UMKM juga perlu mendapatkan pemahaman terkait strategi penjualan mencakup segmentasi, targeting, positioning dan lain sebagainya.

Lainnya, Darmadi juga meminta keterangan Kemendag terkait persoalan lembaga perlindungan konsumen. Yakni Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

"Saya minta dipersiapkan tugas keduanya agar tidak tumpang tindih. Tolong dimonitor supaya ke depannya dapat besar-besaran melaksanakan perlindungan konsumen dengan optimal," ujar legislator dari DPP Jakarta III tersebut.

Dalam rapat tersebut diketahui, anggaran Program Perdagangan Dalam Negeri pada alokasi anggaran Kemendag di 2022 senilai Rp744,53 miliar.

Di mana Komisi VI DPR RI juga telah menyetujui total pagu anggaran Kemendag TA 2022 sebesar Rp2,38 triliun. Secara umum, pagu anggaran Kemendag 2022 menurun hingga 24,1% atau sekitar Rp755,88 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Kritisi Sistem Besi Gudang

Adapun Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengkritisi kinerja Bappebti Kemendag saat ini. Berdasarkan temuannya di beberapa daerah, pelaksanaan SRG masih belum efektif dijalankan lembaga tersebut.

"Harapannya, ada penjelasan terkait laporan dan proyek apa saja terkait Bappebti di 2021 ini. Saya lihat anggarannya masih lumayan, tapi banyak sisi gudang di beberapa kabupaten tidak efektif," ungkap Nasim.

Di Jawa Timur, jelasnya, tidak efektifnya alur kegiatan SRG masih berlangsung hingga kini. Karenanya, ia segera beresat kepada Bappebti untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

Selain itu, menurut politisi PKS itu, SRG di Banyuwangi yang dibangun Bappebti dan pemilik sudah mangkrak bertahun-tahun.

"Saya minta Bappebti dan Kemendag bisa fasilitas dengan menyediakan masalah itu agar berjalan baik demi masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Kemendag diketahui melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem SRG untuk mengoptimalkan kesejahteraan petani. Bappebti mengemban tugas melakukan pengawasan dan pengaturan terkait perdagangan berjangka.

Menanggapi hal itu, Mendag Muhammad Lutfi menyampaikan, pihaknya sudah beresat cepat untuk mengurus ketidakefektifan SRG di banyak daerah. Setidaknya, Lutfi telah mengganti Kepala Bappebti lama dengan yang baru.

SRG pun, akunya, merupakan persoalan krusial Kemendag karena begitu berguna memisahkan tata niaga antara petani, pedagang dan pembeli. Sementara itu, SRG juga berfungsi menjaga stabilitas mata uang petani di Tanah Air.

"Jadi (kekacauan) ini saya akan bereskan dan selesaikan. Covid-19 memang merusak tatanan kerja Kemendag karena kami punya prioritas. Saya bereskan itu agar harok-martabat pertanian bisa berjalan," tegas Lutfi.